



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(PERUBAHAN RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA TARAKAN
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2025**

**Jl. Jend.Sudirman, No.76, Gedung Gadis I Lt 1 dan 2,
Pamusian**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhana Wa' Taala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Transisi Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan dan merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 2 (dua) tahun kedepan.

Bedasarkan pada hasil evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/ Sub Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025, melalui Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Tarakan, Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana



Hasman Parigi, S.E., M.M
Pembina / IVa
NIP. 19720822 2010011 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL..... iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum 4

1.3. Maksud dan Tujuan 7

1.4. Sistematika Penulisan..... 9

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun dan Capaian
Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Tarakan11

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Tarakan16

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan
..... 38

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD..... 42

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat . 47

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

4.1 Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 48

4.2 Pendanaan 48

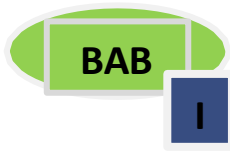
BAB IV PENUTUP 62

Daftar Tabel

1. Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pencapaian Renstra sd Tahun 2025	13
2. Tabel 2	Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35
3. Tabel 3	Review Terhadap Rencana Akhir RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2025.....	47
4. Tabel 4	Perubahan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025.....	50

Daftar Gambar

1. Gambar 1.1	Bagan Alur Rancangan Renja Perangkat Daerah	2
2. Gambar 1.2	Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah	3



PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai Salah Satu Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan merupakan Instansi Pelaksana yang melakukan kegiatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat dalam bentuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Renja merupakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

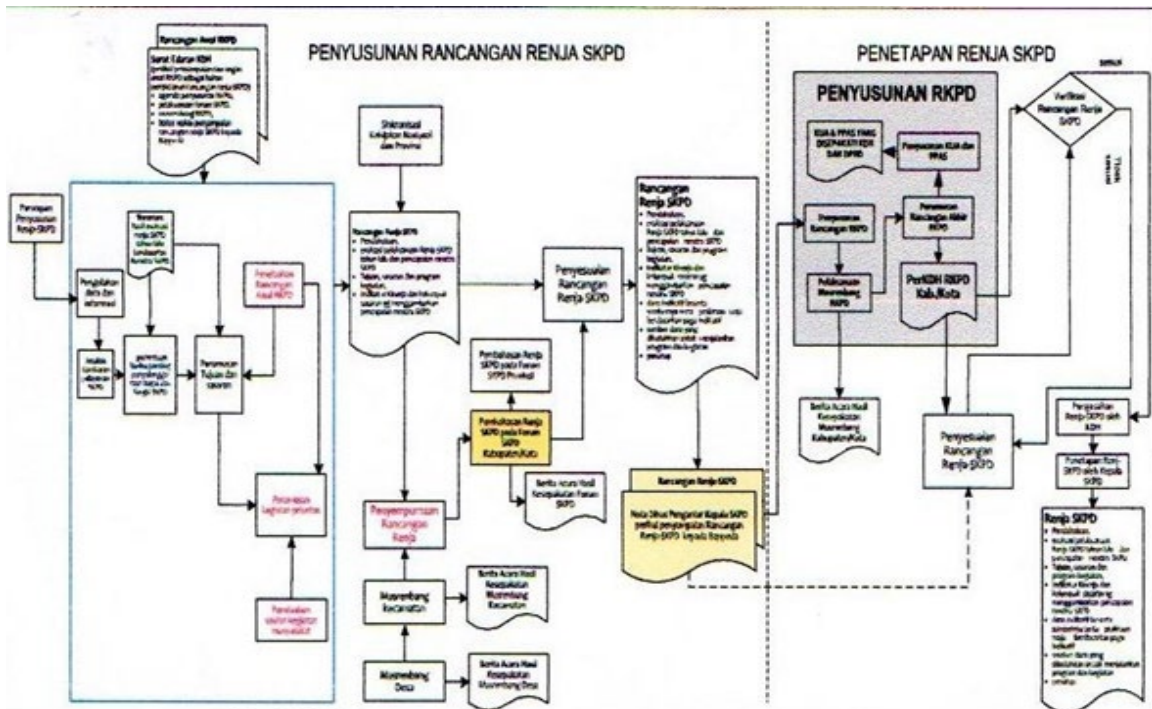
Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun berkenaan dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan pada uraian di atas, serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2025.

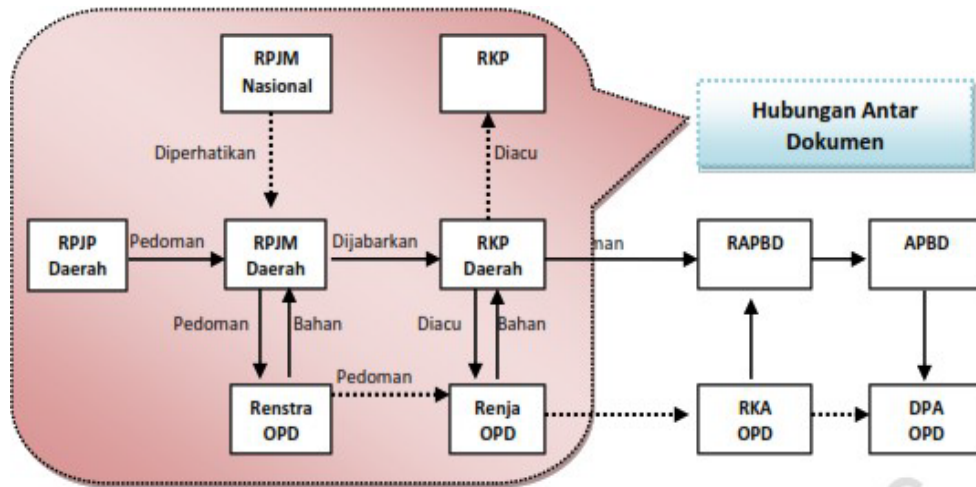
Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
3. Urusan wajib non pelayanan dasar yang mengacu pada IKU dan IKK sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



Gambar 1.1 Baglan Alur Rancangan Renja Perangkat Daerah

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen - dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.2 Bagam Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Penyelenggaraan Evaluasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
19. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
28. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
29. Peraturan Wali Kota Nomor 68 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini untuk memantapkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam keberhasilan mencapai tujuan dalam mewujudkan

pemerintahan yang lebih baik (Good Government) dengan penyelenggaraan seiring dalam perwujudan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat dan terukur. Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 ini disusun dengan maksud :

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2025;
2. Untuk menterjemahkan Perencanaan Strategis Lima Tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke dalam Perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan
3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025 – 2030.

2. Menetapkan program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025;
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan .
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kota Tarakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Perubahan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN.

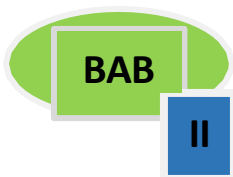
Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dan capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN

Bab ini memuat Program dan Kegiatan serta sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN

RENSTRA.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana melaksanakan 9 (sembilan) Program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **7.402.941.784,-**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada **tabel 1** dibawah ini :

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Kota Tarakan
Tahun 2025

Sasaran Pembangunan Tahunan :

- 1. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- 2. Meningkatnya peran perempuan, anak, keluarga, masyarakat dalam Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Hak Anak
- 3. Mewujudkan keluarga berkualitas

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub- output)	Target Akhir Renstra Tahun RPJM/Renstra (2021-2026)		Realisasi Capaian Kinerja Renja sampai dengan Tahun sebelumnya (2024)		Target Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2025)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja & Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJM/Renstra s/d Tahun yang dievaluasi (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														II											
1	3					4	5	6		7		8		10		13 = (9 + 10 + 11 + 12)		14 = (13 / 8 * 100) %		15 = (7 + 13)		16 = (15 / 6 * 100) %		17	18
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	K (%)	Rp (%)		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																			
	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																			
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota																			
1	2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraa	0 Orang	Rp 38.394.000,00	0 Orang	Rp 0	30 Orang	Rp 38.394.000,00	48 Orang	Rp 0	48 Orang	Rp 0	160,00 %	0,00 %	48 Orang	Rp 0	0,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian	tdk ada masalah

							n PUG																		Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																				
2	2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	0 Lembaga	Rp 500.000.000,00	2 Lembaga	Rp250.000.000,00	2 Lembaga	Rp 250.000.000,00	0 Lembaga	Rp 0	0 Lembaga	Rp 0	0,00 %	0,00 %	2 Lembaga	Rp 250.000.000,00	0,00 %	50,00 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Rata-rata capaian kinerja (%)													80,00	0,00			80,00	0,00			0,00	25,00				
Predikat kinerja													T	SR			T	SR			SR	SR				
	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN																				
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																				
3	2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Rp 88.626.970,00	4 Dokumen	Rp 68.556.425,00	4 Dokumen	Rp 20.041.840,00	2 Dokumen	Rp 22.307.000,00	2 Dokumen	Rp 22.307.000,00	50,00 %	111,30 %	6 Dokumen	Rp 90.863.425,00	0,00 %	102,52 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah	
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota																				
4	2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	0 Orang	Rp 20.614.270,00	40 Orang	Rp 11.117.060,00	90 Orang	Rp 5.244.770,00	7 Orang	Rp 5.987.093,00	7 Orang	Rp 5.987.093,00	7,78 %	114,15 %	47 Orang	Rp 17.104.153,00	0,00 %	82,97 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah	
5	2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban	0 Layanan	Rp 268.347.710,00	4 Layanan	Rp147.617.782,00	4 Layanan	Rp 87.765.850,00	0 Layanan	Rp 0	0 Layanan	Rp 0	0,00 %	0,00 %	4 Layanan	Rp 147.617.782,00	0,00 %	55,01 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga		

						Kabupaten/Kota	Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																	Berencana	
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
6	2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	0 Orang	Rp 37.703.100,00	50 Orang	Rp 16.749.040,00	50 Orang	Rp 18.851.400,00	0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0	0,00 %	0,00 %	50 Orang	Rp 16.749.040,00	0,00 %	44,42 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Rata-rata capaian kinerja (%)													14,44	56,36			14,44	56,36			0,00	71,23			
Predikat kinerja													SR	R			SR	R			SR	S			
	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA																			
	2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
7	2	08	04	2.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Rp 18.799.740,00	1 Dokumen	Rp 9.355.900,00	1 Dokumen	Rp 9.399.870,00	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0,00 %	0,00 %	1 Dokumen	Rp 9.355.900,00	0,00 %	49,77 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
8	2	08	04	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat	0 Orang	Rp 24.538.040,00	30 Orang	Rp 11.509.690,00	30 Orang	Rp 12.175.120,00	0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0	0,00 %	0,00 %	30 Orang	Rp 11.509.690,00	0,00 %	46,91 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

							Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																			
	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																				
9	2	08	04	2.03	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Layanan	Rp 19.879.240,00	40 Layanan	Rp 9.924.220,00	40 Layanan	Rp 9.939.440,00	0 Layanan	Rp 0	0 Layanan	Rp 0	0,00 %	0,00 %	##### #	Rp 9.924.220,00	0,00 %	49,92 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Rata-rata capaian kinerja (%)														0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	48,86			
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR			SR	SR			
	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK																				
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																				
#	2	08	05	2.01	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Rp 10.903.810,00	1 Dokumen	Rp 4.605.750,00	2 Dokumen	Rp 5.451.850,00	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0,00 %	0,00 %	1 Dokumen	Rp 4.605.750,00	0,00 %	42,24 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Rata-rata capaian kinerja (%)														0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	42,24			
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR			SR	SR			
	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)																				
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																				
#	2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan	0 Organisasi	Rp 116.118.660,00	44 Organisasi	Rp 46.661.508,00	39 Organisasi	Rp 60.459.300,00	0 Organisasi	Rp 0	##### #	Rp 0	0,00 %	0,00 %	##### #	Rp 46.661.508,00	0,00 %	40,18 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

17 | **PERUBAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (PERUBAHAN RENJA) DP3APPKB TAHUN 2025**

							/program/ kegiatan pencegahan KTA																	Berencana	
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
#	2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	0 Orang	Rp 40.855.197,00	20 Orang	Rp 22.058.500,00	40 Orang	Rp 18.220.000,00	13 Orang	Rp 0	23 Orang	Rp 0	57,50 %	0,00 %	43 Orang	Rp 22.058.500,00	0,00 %	53,99 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masala
#	2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	0 Layanan	Rp 83.931.400,00	0 Layanan	Rp 0	40 Layanan	Rp 83.931.400,00	13 Layanan	Rp 22.942.000,00	23 Layanan	Rp 26.377.745,00	57,50 %	31,43 %	##### #	Rp 26.377.745,00	0,00 %	31,43 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
#	2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	0 Orang	Rp 70.020.000,00	60 Orang	Rp 66.443.920,00	30 Orang	Rp 1.000.000,00	55 Orang	Rp 59.650.000,00	55 Orang	Rp 59.650.000,00	183,33 %	5965,00 %	115 Orang	Rp 126.093.920,00	0,00 %	180,08 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah
#	2	08	07	2.03	0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	0 Orang	Rp 41.331.330,00	5 Orang	Rp 18.461.290,00	20 Orang	Rp 20.938.970,00	0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0	0,00 %	0,00 %	5 Orang	Rp 18.461.290,00	0,00 %	44,67 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Rata-rata capaian kinerja (%)														59,92	1220,26			80,18	1227,21			0,00	85,71		
Predikat kinerja														R	UNK			T	UNK			SR	T		
2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
2	14	02				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK																			
2	14	0	2.0			Pemetaan Perkiraan																			

			2	2		Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																			
#	2	14	0 2	2.0 2	000 2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	0 Dokumen	Rp 474.630.400,00	1 Dokumen	Rp186.329.180,00	1 Dokumen	Rp 287.401.600,00	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0,00 %	0,00 %	1 Dokumen	Rp 186.329.180,00	0,0 0 %	39,26 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
#	2	14	0 2	2.0 2	001 1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	0 Dokumen	Rp 252.084.080,00	1 Dokumen	Rp152.711.120,00	1 Dokumen	Rp 72.962.240,00	0 Dokumen	Rp 17.300.000,00	0 Dokumen	Rp 17.300.000,00	0,00 %	23,71 %	1 Dokumen	Rp 170.011.120,00	0,0 0 %	67,44 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah
#	2	14	0 2	2.0 2	001 2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	0 Laporan	Rp 65.555.600,00	1 Laporan	Rp 38.723.386,00	1 Laporan	Rp 20.878.800,00	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0,00 %	0,00 %	1 Laporan	Rp 38.723.386,00	0,0 0 %	59,07 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Rata-rata capaian kinerja (%)														0,00	7,90			0,00	7,90			0,0 0	55,26		
Predikat kinerja														SR	SR			SR	SR			SR	R		
	2	14	0 3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)																			
	2	14	0 3	2.0 1		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal																			
#	2	14	0 3	2.0 1	000 8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	0 Laporan	Rp 142.000.000,00	1 Laporan	Rp134.567.540,00	1 Laporan	Rp 2.000.000,00	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0,00 %	0,00 %	1 Laporan	Rp 134.567.540,00	0,0 0 %	94,77 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
#	2	14	0 3	2.0 1	001 1	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi	0 Laporan	Rp 80.576.000,00	1 Laporan	Rp 50.540.000,00	1 Laporan	Rp 15.196.000,00	0 Laporan	Rp 13.200.000,00	0 Laporan	Rp 27.600.000,00	0,00 %	181,63 %	1 Laporan	Rp 78.140.000,00	0,0 0 %	96,98 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah

							Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
#	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0 Dokumen	Rp 5.600.000,00	1 Dokumen	Rp 2.600.000,00	1 Dokumen	Rp 2.800.000,00	0 Dokumen	Rp 2.397.600,00	0 Dokumen	Rp 2.397.600,00	0,00 %	85,63 %	1 Dokumen	Rp 4.997.600,00	0,00 %	89,24 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah
#	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	0 Dokumen	Rp 129.470.800,00	1 Dokumen	Rp110.831.680,00	1 Dokumen	Rp 14.700.000,00	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0,00 %	0,00 %	1 Dokumen	Rp 110.831.680,00	0,00 %	85,60 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
#	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0 Organisasi	Rp 210.000.000,00	4 Organisasi	Rp162.820.000,00	10 Organisasi	Rp 10.000.000,00	0 Organisasi	Rp 25.356.000,00	##### #	Rp 46.456.000,00	50,00 %	464,56 %	##### #	Rp 209.276.000,00	0,00 %	99,66 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)																			
#	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0 Orang	Rp 62.000.000,00	40 Orang	Rp 43.699.880,00	80 Orang	Rp 2.000.000,00	0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0	0,00 %	0,00 %	40 Orang	Rp 43.699.880,00	0,00 %	70,48 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota																			
#	2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian	0 Laporan	Rp 30.700.000,00	1 Laporan	Rp 29.678.050,00	1 Laporan	Rp 1.000.000,00	1 Laporan	Rp 12.987.850,00	1 Laporan	Rp 12.987.850,00	100,00 %	1298,79 %	2 Laporan	Rp 42.665.900,00	0,00 %	138,98 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan,	tdk ada masalah

						dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
#	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0 Orang	Rp 477.830.850,00	232 Orang	Rp387.911.850,00	148 Orang	Rp 1.000.000,00	0 Orang	Rp 89.050.000,00	131 Orang	Rp 99.550.000,00	88,51 %	9955,00 %	363 Orang	Rp 487.461.850,00	0,00 %	102,02 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah
#	2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0 Laporan	Rp 24.900.000,00	1 Laporan	Rp 17.560.000,00	1 Laporan	Rp 1.000.000,00	1 Laporan	Rp 30.140.000,00	1 Laporan	Rp 30.140.000,00	100,00 %	3014,00 %	2 Laporan	Rp 47.700.000,00	0,00 %	191,57 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah
	2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Komasyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																			
#	2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0 Dokumen	Rp 4.750.000,00	1 Dokumen	Rp 3.720.000,00	1 Dokumen	Rp 1.000.000,00	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0,00 %	0,00 %	1 Dokumen	Rp 3.720.000,00	0,00 %	78,32 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah
#	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Kampung	Rp 44.000.000,00	4 Kampung	Rp 35.080.000,00	20 Kampung	Rp 1.000.000,00	4 Kampung	Rp 27.900.000,00	4 Kampung	Rp 27.900.000,00	20,00 %	2790,00 %	8 Kampung	Rp 62.980.000,00	0,00 %	143,14 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah
Rata-rata capaian kinerja (%)													20,00	1493,99			32,59	1617,24			0,00	108,25			
Predikat kinerja													SR	UNK			SR	UNK			SR	UNK			
	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)																			

	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																			
#	2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Laporan	Rp 17.917.340,00	5 Laporan	Rp 8.522.600,00	1 Laporan	Rp 7.917.340,00	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0,00 %	0,00 %	5 Laporan	Rp 8.522.600,00	0,00 %	47,57 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah
#	2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	0 Unit	Rp 139.998.100,00	4 Unit	Rp104.434.000,00	4 Unit	Rp 9.999.050,00	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0,00 %	0,00 %	4 Unit	Rp 104.434.000,00	0,00 %	74,60 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah
#	2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatih an Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	0 Orang	Rp 82.430.000,00	261 Orang	Rp 34.623.549,00	30 Orang	Rp 46.577.600,00	0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0	0,00 %	0,00 %	261 Orang	Rp 34.623.549,00	0,00 %	42,00 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah
#	2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberda	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan	0 Kelompok	Rp 20.000.000,00	31 Kelompok	Rp 10.000.000,00	2 Kelompok	Rp 10.000.000,00	0 Kelompok	Rp 0	0 Kelompok	Rp 0	0,00 %	0,00 %	##### #	Rp 10.000.000,00	0,00 %	50,00 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah

							Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk																		
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																			
#	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0 laporan	Rp 266.000.000,00	1 laporan	Rp233.828.500,00	1 laporan	Rp 5.000.000,00	0 laporan	Rp 0	0 laporan	Rp 0	0,00 %	0,00 %	1 laporan	Rp 233.828.500,00	0,00 %	87,91 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah
#	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	0 laporan	Rp 421.100.000,00	1 laporan	Rp365.644.272,00	1 laporan	Rp 5.000.000,00	1 laporan	Rp 84.960.000,00	1 laporan	Rp 84.960.000,00	100,00 %	1699,20 %	2 laporan	Rp 450.604.272,00	0,00 %	107,01 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah
Rata-rata capaian kinerja (%)													16,67	283,20			16,67	283,20			0,00	68,18			
Predikat kinerja													SR	UNK			SR	UNK			SR	S			
	X					NON URUSAN																			
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																			
	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
	X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
#	X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	0 Laporan	Rp 2.000.000,00	0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 2.000.000,00	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0,00 %	0,00 %	0 Laporan	Rp 0	0,00 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

							Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
#	X	X X	0 1	2.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Rp 2.000.000,00	0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 2.000.000,00	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0,00 %	0,00 %	0 Laporan	Rp 0	0,0 0 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
#	X	X X	0 1	2.0 1	000 8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen	Rp 5.000.000,00	0 Dokumen	Rp 0	1 Dokumen	Rp 5.000.000,00	0 Dokumen	Rp 0	0 Dokumen	Rp 0	0,00 %	0,00 %	0 Dokumen	Rp 0	0,0 0 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	X	X X	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																			
#	X	X X	0 1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bula n	Rp 7.450.488.243,00	324 Orang/bula n	##### #	##### #	Rp 3.793.199.265,00	25 Orang/bula n	##### ##	##### #	##### ##	100,0 0 %	52,58 %	##### #	Rp 5.545.601.120,00	0,0 0 %	74,43 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah
#	X	X X	0 1	2.0 2	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Rp 117.852.000,00	2 Dokumen	Rp 46.894.500,00	1 Dokumen	Rp 58.926.000,00	0 Dokumen	Rp 23.163.000,00	0 Dokumen	Rp 23.163.000,00	0,00 %	39,31 %	2 Dokumen	Rp 70.057.500,00	0,0 0 %	59,45 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah
	X	X X	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah																			
#	X	X X	0 1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	Rp 9.959.680,00	1 Paket	Rp 4.703.460,00	2 Paket	Rp 4.979.840,00	0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0	0,00 %	0,00 %	1 Paket	Rp 4.703.460,00	0,0 0 %	47,23 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
#	X	X X	0 1	2.0 6	000 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	Rp 6.000.000,00	0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 6.000.000,00	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0,00 %	0,00 %	0 Laporan	Rp 0	0,0 0 %	0,00 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
#	X	X X	0 1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	Rp 101.852.800,00	7 Laporan	Rp 49.411.000,00	10 Laporan	Rp 52.441.800,00	2 Laporan	Rp 2.759.180,00	3 Laporan	Rp 9.284.180,00	30,00 %	17,70 %	##### #	Rp 58.695.180,00	0,0 0 %	57,63 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah

	X	X	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
#	X	X	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp 88.555.700,00	35 Unit	Rp442.450.000,00	7 Unit	Rp 44.277.850,00	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0,00 %	0,00 %	35 Unit	Rp 442.450.000,00	0,00 %	499,63 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	X	X	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
#	X	X	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	Rp 4.000.000,00	1 Laporan	Rp 2.000.000,00	1 Laporan	Rp 2.000.000,00	0 Laporan	Rp 0	1 Laporan	Rp 2.000.000,00	100,00 %	100,00 %	2 Laporan	Rp 4.000.000,00	0,00 %	100,00 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
#	X	X	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	Rp 147.447.239,00	1 Laporan	Rp 28.676.274,00	1 Laporan	Rp 75.931.218,00	0 Laporan	Rp 3.286.450,00	0 Laporan	Rp 13.617.952,00	0,00 %	17,93 %	1 Laporan	Rp 42.294.226,00	0,00 %	28,68 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah
	X	X	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																			
#	X	X	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	Rp 5.418.000,00	8 Unit	Rp 1.918.300,00	8 Unit	Rp 2.709.000,00	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0,00 %	0,00 %	8 Unit	Rp 1.918.300,00	0,00 %	35,41 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
#	X	X	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	Rp 81.313.268,00	14 Unit	Rp 32.095.150,00	14 Unit	Rp 48.528.934,00	0 Unit	Rp 733.600,00	4 Unit	Rp 11.267.800,00	28,57 %	23,22 %	18 Unit	Rp 43.362.950,00	0,00 %	53,33 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	tdk ada masalah
#	X	X	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Rp 19.740.000,00	15 Unit	Rp 9.620.000,00	15 Unit	Rp 9.870.000,00	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0,00 %	0,00 %	15 Unit	Rp 9.620.000,00	0,00 %	48,73 %	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Pemberdayaa n Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Rata-rata capaian kinerja (%)													8,57	6,18			18,47	17,91			0,00	71,75			
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR			SR	S			

Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya:

Kota Tarakan, 23-07-2025



Hasman Parigi, S.E., M.M
NIP. 19720822 2010011 001

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Laporan Dalev Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dan Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang di rencanakan akan dilaksanakan di triwulan 3 sampai saat itu belum dilakukan karena adanya perubahan pada rincian belanja kegiatan baru bisa dilaksanakan pada triwulan 4. Sehingga dengan rata rata capaian kinerja pada program tersebut adalah 0% dengan Predikat Kinerja sangat rendah.

Dan Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam peningkatan pelayanan adalah :

1. Melakukan perubahan anggaran pada DPAP TA 2025.
2. Melakukan pelaporan BOKB agar dana DAK Non Fisik KB tahap 2 segera cair.

3. Koordinasi internal terus dilaksanakan agar kegiatan bisa dilakukan dengan cepat dan tepat dsasaran.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN .

Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijakan Program operasional dan kegiatan -kegiatan. Untuk itu dibutuhkan jalinan kerjasama yang kuat dan kepercayaan antara masyarakat dan instansi terkait.

Keberhasilan program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sulit untuk terwujud jika tidak didukung oleh berbagai faktor internal antara lain perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang terampil serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang ditawarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan mengacu pada satu tujuan mewujudkan visi dan misi Kota Tarakan yang akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan beserta program prioritas.

Berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan evaluasi capaian target kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bahwa realisasi capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara umum sampai dengan tahun 2022 telah memenuhi target. Namun, kendala yang ada sampai saat ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana dan jumlah serta kemampuan SDM yang kurang merata, hal-hal ini menghambat kinerja aparatur dalam memberikan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dapat dilihat pada **tabel 2** berikut ini :

Tabel 2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	Target IKU/IKK	Target Renstra Tahun 2025 s/d 2030						Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	2024	2025	
1	2		3	4	5	6	7	8		10	11	13
1	IPG		92,79	92,8	93	93,5	94	94,5	95	92,79	92,8	Target IKU
2	IDG		68,54	68,6	68,8	69	69,5	69,64	69,74	68,54	68,6	Target IKU
3	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP)		0,00026	0,00025	0,00024	0,00023	0,00022	0,00021	0,0002	0,00026	0,00025	Target IKU
4	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA)		0,00098	0,00097	0,00096	0,00095	0,00094	0,00093	0,00092	0,00098	0,00097	Target IKU
5	Angka Kelahiran Total (TFR)		2,16	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19	2,16	2,24	Target IKU
5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)		60,4	62	62,5	62,8	63	63,3	63,5	60,4	62	Target IKU
6	Nilai SAKIP		85,87	85,9	86	86,5	87	87,5	88	85,87	85,9	Target IKU
7	Nilai IKM		88,74	88,74	88,75	88,76	88,77	88,78	88,79	88,74	88,74	Target IKU

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi Kepala Daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 2) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk

menunjang pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

b. Permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:

- 1) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100.
- 2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain.
- 3) Pengelolaan Data Informasi Gender yang relatif rendah, terlihat dari data yang kurang lengkap.
- 4) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT maupun anak.
- 5) Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
- 6) Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 7) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

c. Permasalahan terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ber-KB
- 2) Prinsip keyakinan sekelompok masyarakat tidak boleh ber-KB
- 3) Masih kurangnya SDM penyuluh KB
- 4) Masih kurangnya SDM Kader
- 5) Metoda pendataan yang masih konvensional
- 6) Kurang pedulinya masyarakat terhadap pentingnya pendataan keluarga
- 7) Belum optimalnya pendataan keluarga untuk dientry dalam aplikasi Sistem Informasi Keluarga
- 8) Belum optimalnya indikator data resiko stunting dan penanganan keluarga yang berisiko stunting.

2. Kelemahan

Kelemahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.
- b. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender
- c. Terbatasnya personil terlatih yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d. Kurangnya pegawai yang memiliki SDM yang handal sesuai tupoksinya
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat akan ber-KB
- f. Prinsip keyakinan sekelompok masyarakat tidak boleh ber KB
- g. Masih Kurangnya SDM penyuluh KB
- h. Kurangnya koordinasi dengan lintas Perangkat Daerah dalam penanganan stunting.

3. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam

upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- i. Masih banyaknya orang yang enggan memakai alat kontrasepsi karena larangan agama.
- j. Adanya keyakinan bahwa penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom dianggap melegalkan perzinaan dan seks bebas.
- k. Ada pula potensi hambatan dari Rancangan Revisi KUHP yang sedang dibahas DPR : larangan mempertunjukkan alat kontrasepsi yang berpotensi mempidanakan banyak pihak. Selain beberapa faktor minor seperti keinginan pasangan memiliki anak lagi, lagi hamil

4. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- b. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana

Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).

- d. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- f. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- g. Dukungan pemerintah pada program Keluarga Berencana dengan program Kampung Keluarga Berencana.
- h. Dukungan para ulama akan penggunaan alat kontrasepsi dan pengaturan kelahiran.
- i. Pilihan penggunaan beragam metode kontrasepsi berdasarkan pilihan aseptor.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Review terhadap rancangan Akhir RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan berdasarkan Rancangan Akhir RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Review terhadap rancangan Akhir RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dapat dijabarkan pada **Tabel 3** di bawah ini

Tabel 3

Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD (Rencana Kerja Daerah) Tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pdalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan

KODE					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rancangan Akhir RKPD			Lokasi	Hasil Analisis Kebutuhan			Keterangan	OPD
1	2	3	4	5			Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)		
(1)					(2)		(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(13)
2.					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.517.367.241				7.250.556.613	- 266.810.628	DPPPAPPKB
2.	8.	..			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.452.056.371				5.262.237.183	- 189.819.188	DPPPAPPKB
2.	8.	01.	.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	4.105.955.211		Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	4.205.580.083	99.624.872	DPPPAPPKB
2.	8.	01.	2.01.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	1 Dokumen	9.000.000		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	1 Dokumen	7.655.800		DPPPAPPKB
2.	8.	01.	2.01.	0001	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tarakan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2.000.000	Tarakan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.703.800		DPPPAPPKB
2.	8.	01.	2.01.	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	2.000.000	Tarakan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1.712.000		
2.	8.	01.	2.01.	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	5.000.000	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokumen	4.240.000		
2.	8.	01.	2.02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Layanan	3.726.931.021		Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 Layanan	3.914.712.819		DPPPAPPKB
2.	8.	01.	2.02.	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tarakan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bln	3.668.005.021	Tarakan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bln	3.853.086.818,69	59.887.554	DPPPAPPKB
2.	8.	01.	2.02.	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	58.926.000	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	61.626.000	2.700.000	DPPPAPPKB
2.	8.	01.	2.06.		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	3 Layanan	90.493.820		Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	3 Layanan	63.366.240		DPPPAPPKB
2.	8.	01.	2.06.	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tarakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	27.072.520	Tarakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	27.072.520	2.106.460	DPPPAPPKB
2.	8.	01.	2.06.	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	4.979.500	Tarakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	4.979.840		DPPPAPPKB
2.	8.	01.	2.06.	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tarakan			6.000.000	Tarakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.100.000	5.100.000	DPPPAPPKB
2.	8.	01.	2.06.	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 laporan	52.441.800	Tarakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 laporan	26.213.880	- 26.227.920	DPPPAPPKB
2.	8.	01.	2.07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah aset/BMD yang diadakan	23 Buah	77.931.218		Jumlah aset/BMD yang diadakan	7 Buah	59.326.273	15.048.423	DPPPAPPKB
2.	8.	01.	2.07.	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 buah	77.931.218	Tarakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Buah	59.326.273	15.048.423	DPPPAPPKB
2.	8.	01.	2.08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	2 Layanan	77.931.218		Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	2 Layanan	85.411.018		DPPPAPPKB
2.	8.	01.	2.08.	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.000.000	Tarakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.000.000		DPPPAPPKB

2.	8.	01.	2.08.	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	75.931.218	Tarakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	83.411.018	7.479.800	DPPPAPPKB
2.	8.	01.	2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah aset/BMD yang dipelihara	30 Unit	123.667.934		Jumlah aset/BMD yang dipelihara	30 Unit	75.107.934		DPPPAPPKB
2.	8.	01.	2.09.	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tarakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	65.269.000	Tarakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 unit	10.209.000	- 55.060.000	DPPPAPPKB
2.	8.	01.	2.09.	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tarakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	48.528.934	Tarakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	55.028.934	6.500.000	DPPPAPPKB
2.	8.	01.	2.09.	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	9.870.000	Tarakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	9.870.000		DPPPAPPKB
2.	8.	02.	.		Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		Cakupan PUG yang aktif	96%	338.388.800		Cakupan PUG yang aktif	96%	277.672.000		DPPPAPPKB
2.	8.	02.	2.01.		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG	1 Lembaga	38.388.800		Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG	1 Lembaga	27.672.000	- 10.722.000	DPPPAPPKB
2.	8.	02.	2.01.	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Tarakan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 OPD	38.388.800	Tarakan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 OPD	27.672.000		DPPPAPPKB
2.	8.	02.	2.03.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga yang dibina	2 lembaga	300.000.000		Jumlah lembaga yang dibina	2 lembaga	250.000.000		DPPPAPPKB
2.	8.	02.	2.03.		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepadaLembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	2 lembaga	300.000.000	Tarakan			250.000.000		DPPPAPPKB
2.	8.	03.	.		Program Perlindungan Perempuan		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	100%	291.610.990		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani	100%	150.368.640		DPPPAPPKB
2.	8.	03.	2.01.		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	7 Kegiatan	69.441.680		Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan	7 Kegiatan	20.614.320	- 48.827.360	DPPPAPPKB
2.	8.	03.	2.01.	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	69.441.680	Tarakan			20.614.320	- 48.827.360	DPPPAPPKB
2.	8.	03.	2.02.		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah kasus yang mendapat pelayanan (data simponi)	90 kasus	203.318.090		Jumlah kasus yang mendapat pelayanan (data simponi)	90 kasus	115.037.420		DPPPAPPKB
2.	8.	03.	2.02.	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	90 orang	115.554.400	Tarakan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	90 orang	115.037.420		DPPPAPPKB
2.	8.	03.	2.02.	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 layanan	87.763.690	Tarakan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 layanan	72.002.960	- 15.760.730	DPPPAPPKB
2.	8.	03.	2.03.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi	1 lembaga	18.851.220		Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi	8 Lembaga	14.716.900		DPPPAPPKB
2.	8.	03.	2.03.	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	18.851.220	Tarakan	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 orang	14.716.900		DPPPAPPKB
2.	8.	04.	.		Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Persentase Puspuga yang aktif	25%	45.458.000		Persentase Puspuga yang aktif	25%	35.150.180		DPPPAPPKB

2.	8.	04.	2.01.		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak yang terdistribusi	100 buah	23.344.200		Jumlah media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak yang terdistribusi	100 buah	19.064.880		DPPPAPPKB
2.	8.	04.	2.01.	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	13.946.000	Tarakan			11.186.500	- 2.759.500	DPPPAPPKB
2.	8.	04.	2.01.	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	9.398.200	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	7.878.380	- 1.519.820	DPPPAPPKB
2.	8.	04.	2.02.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah organisasi yang dikuatkan dan dikembangkan	2 organisasi	12.174.800		Jumlah organisasi yang dikuatkan dan dikembangkan	2 organisasi	8.645.300	- 3.529.500	DPPPAPPKB
2.	8.	04.	2.02.	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	12.174.800	Tarakan			8.645.300	- 3.529.500	DPPPAPPKB
2.	8.	04.	2.03.		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	40 Layanan	9.939.000		Jumlah layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	40 Layanan	7.440.000	- 2.499.000	DPPPAPPKB
2.	8.	04.	2.03.	0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	40 layanan	9.939.000	Tarakan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	40 layanan	7.440.000	- 2.499.000	DPPPAPPKB
2.	8.	05.	.		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	100%	5.451.400		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	100%	4.589.200		DPPPAPPKB
2.	8.	05.	2.01.		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen responsif gender	1 dokumen	5.451.400		Jumlah dokumen responsif gender	1 Dokumen	4.589.200		DPPPAPPKB
2.	8.	05.	2.01.	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	5.451.400	Tarakan	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	4.589.200	- 862.200	DPPPAPPKB
2.	8.	06.	.		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		Nilai indikator penilaian mandiri Kota Layak Anak	875	270.037.300		Skor Penilaian Mandiri Evaluasi KLA	855	225.947.750		DPPPAPPKB
2.	8.	06.	2.01.		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk	1 gugus tugas	98.156.700		Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk	1 gugus tugas	60.263.750		DPPPAPPKB
2.	8.	06.	2.01.	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	39 organisasi	60.459.200	Tarakan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	39 organisasi	28.243.750		DPPPAPPKB
2.	8.	06.	2.01.	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	37.697.500	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Dokumen	32.020.000		DPPPAPPKB
2.	8.	06.	2.02.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif	4 lembaga	171.880.600		Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif	13 Lembaga	165.684.000		DPPPAPPKB
2.	8.	06.	2.02.	0001	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	150.000.000	Tarakan	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	150.000.000		DPPPAPPKB
2.	8.	06.	2.02.	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	21.880.600	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	15.684.000	- 6.196.600	DPPPAPPKB

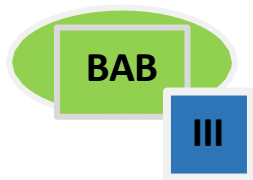
2.	8.	07.	.		Program Perlindungan Khusus Anak		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	395.154.670		1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	1. 100% 2. 74,70	362.929.330		DPPPAPPKB
2.	8.	07.	2.01.		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan pencegahan kekeran terhadap anak	4 Kegiatan	82.170.000		Jumlah kegiatan pencegahan kekeran terhadap anak	4 Kegiatan	78.360.000		DPPPAPPKB
2.	8.	07.	2.01.	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Tarakan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	5 Perangkat daerah	82.170.000	Tarakan	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	1000 Orang	78.360.000		DPPPAPPKB
2.	8.	07.	2.02.		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kasus anak	90 kasus	222.033.660		Jumlah kasus anak	40 Kasus	193.790.360		DPPPAPPKB
2.	8.	07.	2.02.	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	90 Orang	18.317.560	Tarakan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	40 Orang	17.077.560		DPPPAPPKB
2.	8.	07.	2.02.	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Tarakan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	90 Layanan	203.716.100	Tarakan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	90 Layanan	176.712.800		DPPPAPPKB
2.	8.	07.	2.03.		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan yang mendapatkan pendampingan	5 lembaga	90.951.010		Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan yang mendapatkan pendampingan	5 lembaga	90.778.970		DPPPAPPKB
2.	8.	07.	2.03.	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	1 Laporan	70.020.000	Tarakan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	30 Orang	69.840.000		DPPPAPPKB
2.	14	...			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2.065.310.870				1.988.319.430	- 76.991.440	DPPPAPPKB
2.	14	.2.	.		Program Pengendalian Penduduk		Persentase keluarga yang terdata	50,00%	267.121.240		Persentase keluarga yang terdata	50,00%	231.951.400	- 35.169.840	DPPPAPPKB
2.	14	.2.	2.02.		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen data keluarga	1 dokumen	267.121.240		Jumlah dokumen data keluarga	1 dokumen	231.951.400	- 35.169.840	DPPPAPPKB
2.	14	.2.	2.02.	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Tarakan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 dokumen	14.397.600	Tarakan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 dokumen	10.528.000		DPPPAPPKB
2.	14	.2.	2.02.	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tarakan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	122.444.840	Tarakan	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 dokumen	99.671.600		DPPPAPPKB
2.	14	.2.	2.02.	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Tarakan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 laporan	77.278.800	Tarakan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 laporan	70.549.000		DPPPAPPKB
2.	14	.2.	2.02.	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tarakan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	53.000.000	Tarakan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 dokumen	51.202.800		DPPPAPPKB
2.	14	.3.	.		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)		Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	84,00%	1.139.495.780		Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	84,00%	1.119.148.280	- 20.347.500	DPPPAPPKB
2.	14	.3.	2.01.		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	3 Layanan	399.922.000		Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB	3 Layanan	382.144.000	- 17.778.000	DPPPAPPKB
2.	14	.3.	2.01.	0008	Pengendalian Program KKBPK	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 laporan	2.000.000	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 laporan	1.700.000		DPPPAPPKB
2.	14	.3.	2.01.	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan	127.000.000	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 laporan	124.750.000		DPPPAPPKB

2.	14	.3.	2.01.	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), danMini Lokakarya (Minilok)	Tarakan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 laporan	95.196.000	Tarakan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 laporan	87.598.000		DPPPAPPKB
2.	14	.3.	2.01.	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Tarakan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	70.800.000	Tarakan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokumen	70.520.000		DPPPAPPKB
2.	14	.3.	2.01.	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Tarakan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	14.700.000	Tarakan	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 dokumen	7.350.000		DPPPAPPKB
2.	14	.3.	2.01.	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasikepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Tarakan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 organisasi	90.226.000	Tarakan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	10 organisasi	90.226.000		DPPPAPPKB
2.	14	.3.	2.02.		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif	17 orang	144.000.000		Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif	17 orang	142.924.000	- 1.076.000	DPPPAPPKB
2.	14	.3.	2.02.	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tarakan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	80 orang	144.000.000	Tarakan	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	80 orang	142.924.000		DPPPAPPKB
2.	14	.3.	2.03.		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelayanan KB	4 Layanan	543.173.780		Jumlah pelayanan KB	4 Layanan	542.725.780	- 448.000	DPPPAPPKB
2.	14	.3.	2.03.	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Tarakan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	34.300.000	Tarakan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	34.300.000		DPPPAPPKB
2.	14	.3.	2.03.	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tarakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	148 Orang	476.724.000	Tarakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	148 Orang	476.724.000		DPPPAPPKB
2.	14	.3.	2.03.	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tarakan	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	999.780	Tarakan	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	999.780		DPPPAPPKB
2.	14	.3.	2.03.	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana danKesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan TermasukJaringan dan Jejaringnya	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	31.150.000	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	30.702.000		DPPPAPPKB
2.	14	.3.	2.04.		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dim pengelolaan program KKBPK	85 mitra kerja	52.400.000		Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dim pengelolaan program KKBPK	85 mitra kerja	51.354.500	- 1.045.500	DPPPAPPKB
2.	14	.3.	2.04.	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 dokumen	1.000.000	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 dokumen	460.500		DPPPAPPKB
2.	14	.3.	2.04.	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Tarakan	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 kampung	51.400.000	Tarakan	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	20 Kampung KB	50.894.000		DPPPAPPKB
2.	14	.4.	.		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)		Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	100%	658.693.850		Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina		637.219.750	- 21.474.100	DPPPAPPKB
2.	14	.4.	2.01.		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	74.493.850		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	58.117.750	- 16.376.100	DPPPAPPKB
2.	14	.4.	2.01.	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Tarakan	Jumlah laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1 laporan	7.917.200	Tarakan	Jumlah laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	1 laporan	6.807.500		DPPPAPPKB
2.	14	.4.	2.01.	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	Tarakan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	20 unit	9.999.050	Tarakan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)	4 Unit	9.999.050		DPPPAPPKB

2.	14	.4.	2.01.	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tarakan	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	30 Orang	46.577.600	Tarakan	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	200 orang	32.791.200		DPPPAPKB
2.	14	.4.	2.01.	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Tarakan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	2 kelompok	10.000.000	Tarakan	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	2 kelompok	8.520.000		DPPPAPKB
2.	14	.4.	2.02.		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	584.200.000		Jumlah kegiatan	2 kegiatan	579.102.000	- 5.098.000	DPPPAPKB
2.	14	.4.	2.02.	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Tarakan	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	266.000.000	Tarakan	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	263.500.000		DPPPAPKB
2.	14	.4.	2.02.	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Tarakan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	318.200.000	Tarakan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	315.602.000		DPPPAPKB

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.



RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK KOTA TARAKAN.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024. Renja ini disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan tahun 2025. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 di susun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja ini memuat tujuan dan sasaran, Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

4.2. PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK KOTA TARAKAN.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2025 di dukung oleh pendanaan yaitu dari anggaran DAK Fisik
Reguler Keluarga Berencana, DAK Non Fisik (BOKB) serta APBD Kota Tarakan
Tahun 2025.

Hasil Perumusan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan dalam
tabel 4 sebagai berikut :

TABEL. 4
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2025

						tahun										
2	14	02	2.02	012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Persentase keluarga yang terdata TFR Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2,25 25 Tahun 26,65 Persen	2,25 25 Tahun 26,65 Persen	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	85.578.720,00	85.578.720,00
2	14	02	2.02	013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Persentase keluarga yang terdata TFR Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2,25 25 Tahun 26,65 Persen	2,25 25 Tahun 26,65 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	43.796.880,00	43.796.880,00
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)										1.753.888.880,00	1.879.367.792,00
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal										557.100.000,00	557.100.000,00

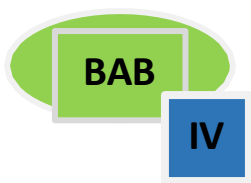
2	14	03	2.01	001	Advokasi Program KKBPk kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) Unmeet need Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPk	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	60,00 % 65,15 % 24,00 %	60,00 % 65,15 % 24,00 %	6 Organisasi	6 Organisasi	100 %	100 %	82.500.000,00	82.500.000,00
---	----	----	------	-----	--	--	---	---	-------------------------------	-------------------------------	--------------	--------------	-------	-------	---------------	---------------

2	14	03	2.01	004	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) Unmeet need Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	60,00 % 65,15 % 24,00 %	60,00 % 65,15 % 24,00 %	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00
2	14	03	2.01	006	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) Unmeet need Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	60,00 % 65,15 % 24,00 %	60,00 % 65,15 % 24,00 %	24 Laporan	10 Laporan	100 %	100 %	52.000.000,00	52.000.000,00
2	14	03	2.01	007	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) Unmeet need Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	60,00 % 65,15 % 24,00 %	60,00 % 65,15 % 24,00 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	192.600.000,00	192.600.000,00
2	14	03	2.01	008	Pengendalian Program KKBPK	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) Unmeet need Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	60,00 % 65,15 % 24,00 %	60,00 % 65,15 % 24,00 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	80.000.000,00	80.000.000,00
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)										44.000.000,00	44.000.000,00

2	14	03	2.02	001	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) Unmeet need Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	60,00 % 65,15 % 24,00 %	60,00 % 65,15 % 24,00 %	1 Organisasi	1 Organisasi	100 %	100 %	4.000.000,00	4.000.000,00
2	14	03	2.02	004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) Unmeet need Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	60,00 % 65,15 % 24,00 %	60,00 % 65,15 % 24,00 %	80 Orang	80 Orang	100 %	100 %	40.000.000,00	40.000.000,00
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota										1.081.788.880,00	1.207.267.792,00
2	14	03	2.03	001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) Unmeet need Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	60,00 % 65,15 % 24,00 %	60,00 % 65,15 % 24,00 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	27.000.000,00	27.000.000,00
2	14	03	2.03	003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) Unmeet need Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	60,00 % 65,15 % 24,00 %	60,00 % 65,15 % 24,00 %	847 Orang	847 Orang	100 %	100 %	392.964.000,00	518.442.912,00
2	14	03	2.03	006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) Unmeet need Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah	60,00 % 65,15 % 24,00 %	60,00 % 65,15 % 24,00 %	44 Unit	44 Unit	100 %	100 %	644.724.880,00	644.724.880,00

								Kabupaten/Kota								
2	14	03	2.03	008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) Unmeet need Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	60,00 % 65,15 % 24,00 %	60,00 % 65,15 % 24,00 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	17.100.000,00	17.100.000,00
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										71.000.000,00	71.000.000,00
2	14	03	2.04	002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) Unmeet need Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terlaksananya pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan	60,00 % 65,15 % 24,00 %	60,00 % 65,15 % 24,00 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	9.000.000,00	9.000.000,00
2	14	03	2.04	003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) Unmeet need Persentase masyarakat yg terpapar isi program KKBPK	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Terlaksananya pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan	60,00 % 65,15 % 24,00 %	60,00 % 65,15 % 24,00 %	4 Kampung	4 Kampung	100 %	100 %	62.000.000,00	62.000.000,00
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)										948.088.101,00	948.088.101,00
2	14	04	2.04		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										948.088.101,00	948.088.101,00

2	14	04	2.04	001	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	100 %	27 Kelompok	27 Kelompok	100 %	100 %	39.988.101,00	39.988.101,00
2	14	04	2.04	002	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	100 %	20 Unit	20 Unit	100 %	100 %	360.000.000,00	360.000.000,00
2	14	04	2.04	005	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 %	100 %	500 Orang	500 Orang	100 %	100 %	548.100.000,00	548.100.000,00
JUMLAH															7.402.941.784,00	7.549.382.076,00



PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2019-2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun Anggaran 2025, menjadi sebesar Rp. **7.549.382.076,00**. Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipergunakan untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2024.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, penyusunan perubahan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD Periode 2025-2030.

Tarakan, Juli 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana



Hasman Parigi, S.E., M.M
Pembina / IVa
NIP. 19720822 2010011 001